

# Menuju BBM Nirsubsidi

Oleh: Hendra Kurniawan

SUDAH seminggu lebih harga BBM khususnya premium dan solar mengalami kenaikan. Keputusan ini akhirnya diambil setelah melalui proses tarik ulur yang panjang. Permasalahannya karena BBM sudah menjadi komoditas yang mahapenting bagi hajat hidup orang banyak sehari-hari. Kebijakan tentang kenaikan harga BBM dan penghapusan subsidi memang menjadi persoalan pelik yang sering dibicarakan tidak hanya di kalangan akademisi namun juga masyarakat kebanyakan. Tak heran apabila muncul serangkaian protes yang menolak kenaikan harga BBM. Timbul pertanyaan benarkah harga BBM memang harus naik?

Mereka yang tidak setuju memiliki alasan bahwa kenaikan harga BBM akan berimbas pada naiknya harga-harga lain termasuk bahan kebutuhan pokok. Akan tetapi jika memang kenaikan harga BBM menjadi suatu keharusan dan dinilai sebagai solusi terbaik bagi perekonomian nasional suka tidak suka harus diterima. Beberapa pakar ekonomi sejak lama memiliki pandangan bahwa harga BBM memang harus naik. Demikian pula keyakinan Dr. A. Prasetyantoko saat menjadi pembicara dalam Seminar *Politik Subsidi, Demi Siapa?* yang diselenggarakan oleh Universitas Sanata Dharma Yogyakarta sekitar 3 hari sebelum kenaikan harga BBM diputuskan.

Dalam paparannya Prasetyantoko menjelaskan bahwa selama ini telah terjadi dilema dalam perekonomian nasional karena bergantung pada rumah tangga konsumsi, se-

mentara rumah tangga produksi tidak berkembang. Tak disangkal memang budaya konsumtif masyarakat dewasa ini tak terbendung lagi. Segalanya menjadi mudah dan praktis diperoleh dengan cara membeli daripada harus membuat. Produksi dalam negeri tidak berkembang sehingga harus diatasi melalui impor. Padahal ekonomi berbasis produksi sangat penting untuk dibangun. Untuk itu pemerintah perlu mengubah *landscape* ekonomi nasional. Cita-cita pemerintah Jokowi-JK untuk membentuk poros maritim Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi nasional yang berbasis produksi.

Atas dasar inilah Prasetyantoko meyakini perlunya kenaikan harga BBM dan penghapusan subsidi agar ada anggaran untuk belanja modal. Postur anggaran yang ada saat ini tidak memungkinkan untuk membangun basis produksi. Anggaran lebih banyak terserap untuk subsidi. Pengurangan subsidi BBM dapat direalokasikan untuk pengadaan infrastruktur dasar dan *social protection* bagi warga miskin. Anggaran yang semestinya untuk subsidi BBM dapat digunakan untuk penguatan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Subsidi BBM selama ini sudah terlalu lama dinikmati oleh masyarakat sehingga sulit untuk dialihkan ke pos anggaran lainnya

karena pasti menimbulkan gejolak. Di sisi lain subsidi BBM mendesak untuk dikurangi bahkan dihapuskan. BBM harus mengikuti harga keekonomian sehingga subsidi produktif dapat diperbesar untuk masa depan rakyat yang lebih baik.

Pemerintah baru saat ini sebaiknya tidak sekedar menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidi namun juga harus mengupayakan perubahan yang serius. Mafia migas harus segera dibongkar dan dihentikan. Ini penting untuk melihat kembali proses penghitungan ongkos produksi BBM guna mengatur harga jualnya. Kenaikan harga bukanlah solusi akhir karena semakin tinggi konsumsi BBM maka subsidi akan semakin meningkat. Artinya diperlukan upaya lain yang secara holistik dan berkelanjutan mampu mengatasi persoalan BBM.

## Energi alternatif

Subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah harus tepat sasaran. Subsidi BBM selama ini hanya menguntungkan masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi. Pertambahan jumlah kendaraan setiap tahunnya terus meningkat, artinya kebutuhan BBM juga ikut bertambah. Jika terus menerus disubsidi maka uang negara hanya akan terbuang sia-sia di jalanan menjadi asap kendaraan bermotor. Untuk itu selain pengalihan subsidi pada sektor lain yang lebih produktif, diperlukan pula

pembenahan transportasi massal dan penegakan kedaulatan energi.

Dalam Nawa Cita atau semboyan agenda prioritas Jokowi-JK, salah satunya mencantumkan cita-cita kemandirian ekonomi dengan memberdayakan gerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Ini dapat dilakukan dengan mewujudkan kedaulatan energi. Laju impor minyak harus ditahan dengan memproduksi sendiri. Kilang-kilang minyak harus dibangun, kemudian tenaga ahli dari dalam negeri harus dilindungi dan dimanfaatkan dengan baik. Dengan demikian kita dapat mengolah sendiri minyak mentah hingga siap digunakan.

Selain itu menurut T. Handoko Eko Prabowo MBA PhD ada hal penting lainnya yaitu mengembangkan energi alternatif yang terbarukan (*renewable resources*). Ada beberapa energi alternatif yang dapat dikembangkan, antara lain gas alam cair (LNG), batu bara, nuklir, tenaga panas bumi, tenaga surya, angin, dan air. Beruntungnya lagi, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan berbagai tawaran energi alternatif tersebut. Semua itu dapat menjadi agenda dalam perubahan kebijakan energi yang diusung oleh pemerintah sekarang. DPR tentu wajib mendukung setiap rencana pemerintah yang berpihak pada rakyat dan bukan justru mengeluarkan ancaman interpelasi. Bagaimana pun suatu ketika BBM nirsubsidi niscaya akan terjadi.

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta